

**PERANAN MOHAMMAD HATTA PADA MASA PEMERINTAHAN
PARLEMENTER 1948-1956**

(Skripsi)

Oleh

Kasirun



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERANAN MOHAMMAD HATTA PADA MASA PEMERINTAHAN PARLEMENTER (1948-1956)

Oleh

Kasirun

Sistem politik yang dilaksanakan pada tahun 1948-1956 ialah menggunakan demokrasi, khususnya demokrasi parlementer. Dalam pelaksanaan pemerintahan parlementer mulai berlaku berdasarkan konstitusi RIS. Sistem pemerintahan parlementer yang menekankan pada demokrasi kedaulatan rakyat, kebebasan berbicara dan sebagainya. Mohammad Hatta sendiri berperan besar dalam jalannya pelaksanaan pemerintahan parlementer, dimana Mohammad Hatta menjadi ketua didalam kabinet dalam periode I, II dan II dan penggagas ekonomi kerakyatan bagi Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa sajakah peranan Mohammad Hatta pada masa sistem pemerintahan Parlementer 1948-1956?”.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Mohammad Hatta pada masa pemerintahan Parlementer 1948-1956. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi, untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengambil kesimpulan bahwa peranan Mohammad Hatta pada masa pemerintahan parlementer 1948-1956 adalah Mohammad Hatta menjadi ketua Kabinet Hatta, menjadi wakil presiden konstitusional, ketua delegasi Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Penggagas Ekonomi Kerakyatan bagi Indonesia.

**PERANAN MOHAMMAD HATTA PADA MASA PEMERINTAHAN
PARLEMENTER 1948-1956**

**Oleh
Kasirun**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada
Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PERANAN MOHAMMAD HATTA PADA
MASA PEMERINTAHAN PARLEMENTER
1948-1956**

Nama Mahasiswa : **Kasirun**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1413033035

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan : Pendidikan IPS

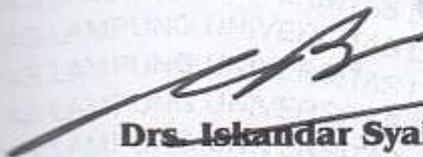
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

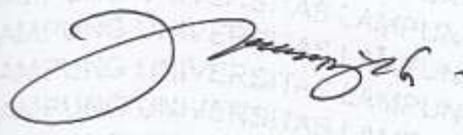

Drs. Iskandar Syah, M.H.
NIP 19521011 198703 1 001

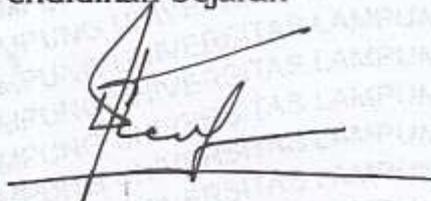

Drs. Wakidi, M.Hum.
NIP 19521216 198603 1 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah


Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

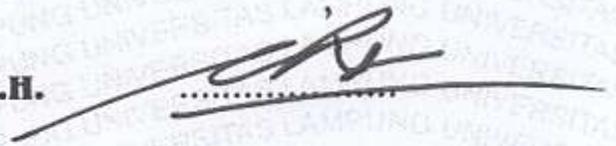

Drs. Syaiful M., M.Si.
NIP 19610703 198503 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

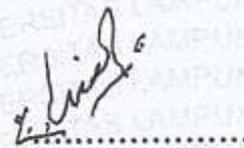
Ketua

: **Drs. Iskandar Syah, M.H.**



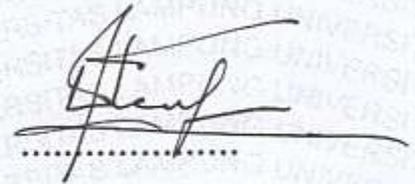
Sekretaris

: **Drs. Wakidi, M.Hum.**



Penguji

: **Drs. Syaiful M., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Februari 2018**

PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Kasirun
NPM : 1413033035
jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
program studi : Pendidikan Sejarah

menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung,

2018



Pemberi pernyataan

Kasirun
NPM. 1413033035

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Pada Tanggal 17 Januari 1994 , merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara, anak dari pasangan Bapak Warim dan Ibu Kasih.

Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Bandar Lampung diselesaikan tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2009, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah melalui jalur PMPAP.

Pada tahun 2015 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jakarta. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 di Desa Muara Jaya II Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, serta penulis juga melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Kebun Tebu pada tahun 2017.

Selama masa berstatus mahasiswa Universitas Lampung penulis sempat aktif dalam organisasi internal maupun eksternal kampus. Dalam lingkup internal kampus yaitu Fokma (Forum Komunikasi Mahasiswa dan Alumni Pendidikan Sejarah) sebagai Staf Bidang Alumni pada periode 2015-2016.

HIMAPIS (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial) sebagai Staf Bidang Media Center pada periode 2015-2016. BEM Universitas sebagai Staff Pemerintahan pada periode 2014-2015.

MOTTO

“Yakinlah saudaraku se-iman, kita bersama Zat yang
maha Pemberi Kemudahan”.

(Khalid Bassalamah)

PERSEMBAHAN

*Terucap syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini
dengan sepenuh hati ini kepada :*

*Kedua orang tuaku, Kakaku Kasno serta seluruh keluarga besarku
yang telah menjadi sumber motivasi semangatku.*

*Para pendidik dan teman-teman kampus yang memberikan semangat
untukku. Serta Almamaterku tercinta*

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Mohammad Hatta Pada Masa Pemerintahan Parlementer 1948-1956”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-Nya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga mendapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hi. Muhammad Fuad, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., Wakil Dekan Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Syaiful. M, M.Si., Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah sekaligus dosen Pembahas yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, kritik, saran, serta nasihat dalam proses kuliah dan proses penyelesaian skripsi. Terimakasih Pak.
7. Drs. Wakidi, M.Hum., sebagai Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberi masukan serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih Bu.
8. Drs. Iskandar Syah, M.H., sebagai pembimbing I dalam skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, sumbangan pikiran, kritik, dan saran selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi. Terimakasih Pak.
9. Henry Susanto, S.S., M.Hum., yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan, sumbangan pikiran, kritik, dan saran maupun selama penyusunan skripsi. Terimakasih Pak.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Drs. Maskun, M.H., Drs. Tontowi, M.Si., Hendry Susanto, S.S., M.Hum., M. Basri, S.Pd., M.Pd., Suparman Arif S.Pd, M.Pd., Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., Cheri Saputra, S.Pd., M.Pd., Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd. Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang penulis banggakan dan pendidik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman

berharga kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.

11. Untuk keluargaku terutama bapak dan ibuku tercinta yang selalu memberikan segalanya.
12. Sahabat-sahabat terbaikku Welly Hasvindo, Farlian (Ope), Septiyan (Ucok), Agil, Fafa, Yusuf, Rizky, Luki, Sabda, Cing, Aldino, Ade atas persahabatan, kekeluargaan dan canda tawa kita selama ini.
13. Dan seseorang yang semua tahu dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini, Kartika Soraya. yang selalu menghibur ketika pening akan masalah dengan senyuman dan perhatiannya canda tawanya, serta tingkah lakunya, terimakasih banyak untuk semangat serta canda tawanya selama ini.
14. Sarah Dhiba (2013), Enggal Dona Martyn (2012), Johan Setiawan (2013), Aryan Sugara (2012), Zhara Mantira (2012), Adi Wiranata (2013), Krisnawidyaningrum (2012), Pipin Ariyanti (2013). Terimakasih untuk semua masukan dan bantuannya.

Penulis berdo'a semoga semua amal dan bantuan mendapat pahala serta balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Bandarlampung, 2018

Penulis

Kasirun
NPM 1413033035

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Analisis Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Batasan Masalah	5
1.2.3 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1 Konsep Peranan	9
2.1.2 Konsep Pemerintahan Parlementer.....	10
2.1.3 Konsep Pemimpin	12
2.1.4 Konsep Mohammad Hatta	13
2.2 Kerangka Pikir	14
2.3 Paradigma	16

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	17
3.2 Metode yang digunakan.....	17
3.3 Variabel Penelitian.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4.1 Teknik Kepustakaan	24
3.4.2 Teknik Dokumentasi.....	25
3.5 Teknik Analisis Data	26

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 HASIL.....	28
4.1.1 Gambaran umum pemerintahan parlementer pasca Kemerdekaan	28
4.1.2 Biografi singkat Mohammad Hatta	31
4.1.2.1 Keluarga.....	32
4.1.2.2 Pendidikan	33
4.1.2.3 Organisasi	33
4.1.3 Peranan Mohammad Hatta Pada Masa Pemerintahan Parlementer 1948-19456	35
4.1.3.1 Mohamma Hatta sebagai perdana menteri	35
1. Kabinet Hatta I	37
1.1 Perlawanan FDR dan PKI.....	41
1.2 Agresi Militer Belanda II.....	43
2. Kabinet Hatta II	45
2.1 Konferensi Antar Indonesia	46
3. Kabinet Hattta III.....	50
4.1.3.2 Mohammad Hatta ketua delegasi KMB	52
4.1.3.3 Penggagas Ekonomi Kerakyatan	57
4.2 PEMBAHASAN	63
4.2.1 Peranan Mohammad Hatta Pada Masa Pemerintahan Parlementer 1948-1956	63
4.2.1.1 Mohammad Hatta sebagai perdana menteri	64
1. Kabinet Hatta I	64
2. Kabinet Hatta II.....	64
3. Kabinet Hatta III	65
4.2.1.2 Mohammad Hatta ketua delegeasi KMB	66
4.2.1.3 Pengagas Ekonomi Kerakyatan.....	66
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel Perbedaan Ekonomi Teoritik dan Ekonomi Sosiologi.....61

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Persetujuan Judul Skripsi	77
2. Pengesahan Komisi Pembimbing	78
3. Surat izin penelitian di Universitas Lampung	79
4. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di perpustakaan Universitas Lampung	80
5. Surat izin penelitian di perpustakaan Daerah Provinsi Lampung	81
6. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian di perpustakaan Daerah Provinsi Lampung	82
7. Foto Kabinet RI pertama	83
8. Foto Sidang Kabinet Hatta II	84
9. Majalah Tempo <i>Hattanomics</i>	85
10. Majalah Tempo <i>Speech of Hatta in Sumatra</i>	86
11. Foto Mohammad Hatta di Pidato Radio	87
12. Surat Keterangan kepada KNIP	88
13. Jurnal Ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan	89
14. Dokumen Penyerahan Kedaulatan	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap orang berpedoman kepada cita-cita bahwa tiap-tiap manusia lahir merdeka dan hidup merdeka. Pemerintah dapat berdiri kalau diakui dan disetujui oleh Parlemen. Suatu pemerintah yang tidak dipercayai oleh Parlemen tentu tidak bisa hidup lama, karena Dewan Rakyat dapat menjatuhkan setiap waktu atau dapat dikatakan sebagai politik. Politik dapat pula disamakan sebagai suatu kekuasaan ataupun negara bahkan ilmu politik diberi arti sebagai suatu ilmu untuk memperoleh kekuasaan didalam negara, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya serta mengatur hubungan antara negara dengan negara atau dengan rakyatnya (Sukarna,1981:7).

Sistem politik yang dilaksanakan pada tahun 1948-1956 ialah menggunakan demokrasi, khususnya demokrasi parlementer. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1945-1949 merupakan revolusi, yang dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari tekad nasional, lambang kemandirian suatu bangsa dan bagi mereka yang terlibat di dalamnya, sebagai suatu pengalaman emosional yang luar biasa dengan rakyat (*J.D Legge,1993: 1*).

Dalam tahun 1949 sampai 1957, sistem politik Indonesia sering disebut Demokrasi Parlementer. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara yang dibuat pada tahun 1949, dengan menekankan pada demokrasi kedaulatan rakyat, kebebasan berbicara, pers, serta tertib hukum. Pemerintah dikuasai oleh elite sipil. Partai politik dipandang sebagai lembaga masyarakat yang terpenting bagi partisipasi rakyat dalam kehidupan nasional. Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Albert Widjaja : 1982, 87).

Dalam sistem demokrasi parlementer, kabinet dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tetap kepala negara, tetapi bukan kepala pemerintahan, suara para anggota DPR biasanya keras sehingga pernah menimbulkan reaksi dikalangan angkatan bersenjata. Para anggota DPR hanyalah mencari kedudukan khususnya sebelum Pemilihan Umum 1955 (Tashadi, 1999:59).

Kabinet dalam masa pra pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 tidak bisa bertahan lama hanya selama 7 bulan, dan hal tersebut mengambat perkembangan politik maupun ekonomi, oleh karena itu pemerintah tidak bisa memaksimalkan kinerja program-programnya. Kemudian pada pemilihan umum tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, bahkan tidak bisa dipungkiri menimbulkan perpecahan antara pemerintah pusat dan diberbagai daerah.

Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan) (Ramlan Surbakti, 1992:134).

Pemikiran sosialisme Mohammad Hatta di pengaruhi oleh sosialisme Barat, hal tersebut disadari karena kiprahnya di Belanda dan hubungan dekatnya dengan kaum sosialis Belanda yang juga banyak mempengaruhi pemikirannya, akan tetapi karena ia seorang yang religius maka pemikiran sosialisnya masih berkenaan dengan sosialis religius atau di juluki sosialis kanan (Soska).

Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh besar Indonesia yang memiliki peran besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia (1989:364) menyatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari pemikiran Mohammad Hatta adalah mempertinggi kesejahteraan rakyat. Selain itu pemikiran Mohammad Hatta bukan hanya mencapai kemerdekaan, tetapi juga tentang bagaimana mempersiapkan Indonesia, untuk memperjuangkan, menerima dan mengisi kemerdekaan itu sebaik-baiknya (Alfian, 1983: 144).

Untuk periode demokrasi parlementer, kepemimpinan nasionalisme masih tetap dilakukan oleh dwi tunggal Soekarno-Hatta (Deliar Noer, 1988:289).

Mohammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta menunjukkan peran besar dalam pengambilan keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum. Beberapa produk hukum yang pernah dikeluarkan oleh Mohammad Hatta

antara lain Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah. Tonggak politik Mohammad Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Mohammad Hatta mendukung pergantian itu.

Maklumat Wakil Presiden No. X menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan eksekutif, yang sehari-hari dilakukan oleh padan pekerja KNIP. Penjelasan terhadap maklumat tersebut yang dikeluarkan pada 20 Oktober 1945 benar-benar mengusung konsep parlementarian. Dalam arti kata, maklumat ini menjadi landasan baru terbentuknya *check and balance* kekuasaan (Salman Alfarizi, 2009: 170).

Mohammad Hatta adalah pendukung negara serikat dan cita-citanya membangun demokrasi parlementer bagi Indonesia. Oleh karena itu, Mohammad Hatta menyetujui usulan dari Badan Pekerja KNIP tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial ke parlementer yang diketuai Sjahrir dengan alasan UUD 1945 tidak memuat pasal yang mewajibkan atau melarang pertanggungjawaban di tingkat menteri, dan bahwa pertanggungjawaban ke KNI (MPR) merupakan salah satu cara menegakkan kedaulatan rakyat (Salman Alfarizi, 2009: 104).

Selain Maklumat No.X, Mohammad Hatta juga mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang anjuran kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Maklumat tersebut bukan saja memberikan pengakuan terhadap arti penting partai politik, tetapi juga menempatkan pemerintah dalam posisi pro aktif ke arah pembentukan partai-partai politik.

Landasan pemikiran yang diajukan Mohammad Hatta demi menegaskan arti penting kehadiran partai adalah bahwa partai politik merupakan institusi politik memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan rakyat (Salman Alfarizi, 2009: 170).

Berdasarkan latar belakang di atas, membuat ketertarikan bagi peneliti untuk untuk membahas Peranan Mohammad Hatta pada masa pemerintahan Parlemerter tahun 1948-1956.

1.2 Analisis Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1.2.1.1 Mohammad Hatta sebagai ketua di dalam Kabinet Hatta pada masa pemerintahan Parlemerter 1948-1956.

1.2.1.2 Peranan Mohammad Hatta pada masa sistem pemerintahan Parlemerter 1948-1956.

1.2.1.3 Pelaksanaan sistem pemerintahan Parlemerter di Indonesia.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu meluas, berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah pada identifikasi masalah yaitu “Peranan Mohammad Hatta pada masa sistem pemerintahan Parlemerter 1948-1956”

1.2.3 Rumusan Masalah

Maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah “Apakah peranan Mohammad Hatta pada masa sistem pemerintahan Parlemen 1948-1956?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Mohammad Hatta pada masa sistem pemerintahan Parlemen 1948-1956.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian untuk kedepannya diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang terutama yang membutuhkan informasi mengenai masalah yang terkait dengan penelitian ini, adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- 1.4.1 Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi setiap pembaca yang ingin menggali lebih dalam tentang peranan Mohammad Hatta pada masa sistem pemerintahan Parlemen 1948-1956.
- 1.4.2 Menambah wawasan penulis tentang Peranan Mohammad Hatta pada masa sistem pemerintahan Parlemen 1948-1956.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam sebuah penelitian, maka penulis berikan batasan ruang lingkup yang akan mempermudah pembaca memahami isi penelitian ini. Adapun ruang lingkup tersebut adalah:

- a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari sesuatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas (benda, orang, dan lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin, disebut (orang), bisa pula berupa proses disebut (lembaga). Dalam penelitian ini, Peneliti membatasi ruang lingkup, objek dalam penelitian ini peranan Mohammad Hatta pada masa pemerintahan Parlemen 1948-1956.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Mohammad Hatta.

c. Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Lampung dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung. disebabkan, karena dalam bidang ilmu sejarah di butuhkan resensi buku guna menunjang penyelesaian penelitian ini.

d. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah tahun 2017

e. Bidang Ilmu

Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi

agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. dalam penelitian ini, peneliti mengambil bidang ilmu sejarah. Karena disesuaikan dengan bidang ilmu peneliti yaitu pendidikan sejarah.

f. Temporal

Dinamakan relasi temporal apabila bagian kalimat yang satu diberikan keterangan waktu dan berkenaan dengan waktu-waktu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi tahun yang diteliti yaitu tahun 1948 hingga tahun 1956.

REFERENSI

- Sukarna. 1981. *Sistem Politik*. Bandung : Alumni. Halaman 7
- J. D Legge. 1993. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta. : Gravitie. Halaman 1
- Albert Widjaja. 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES. Halaman 87
- Tashadi.1999. *Tokoh-tokoh Pemikir Kebangsaan/Ir. Soekarno dan K.H Ahmad Dahlan*. Jakarta : CV. Ilham Bangun Karya. Halaman 59
- Subakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo. Halaman 134
- Alfian, 1983. *Pemikiran dan perubahan Politik Indonesia : Kumpulan Karangan*. Jakarta. Halaman 144
- Deliar Noer. 1990. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES. Halaman 289
- Alfarizi, Salman. 2009. *Mohammad Hatta Biografi Singkat*. Jogjakarta : Garasi. Halaman 104
- Ibid. Halaman 170

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan guna peninjauan kembali (*review*) tentang pustaka masalah-masalah yang akan dijadikan topik penelitian. Di dalam tinjauan pustaka ini akan dicari konsep-konsep yang akan dijadikan landasan teoritis dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini :

2.1.1 Konsep Peranan

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2009 : 212). Peranan ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu, peranan yang dapat dipelajari sebagai bagian dari individu (Bruce J. Cohen, 1992 : 81). Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa (W.J.S Poerwadarminta, 1995 : 751). Menurut pendapat W.J.S Poerwadarminta, peranan adalah suatu yang menjadi

bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal peristiwa (W.J.S Poerwadarminta, 1985 : 735).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peranan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki bagian atau status tertentu untuk melakukan kegiatan di dalam peristiwa yang terdapat hak serta kewajibannya. Seseorang yang telah menjalankan hak serta kewajiban sesuai kedudukannya maka ia telah melaksanakan peranannya.

Peranan Mohammad Hatta dalam pemerintahan Parlemen 1948-1956 yaitu peranan nyata, karena peranan dalam hal ini adalah tindakan nyata yang dilakukan Mohammad Hatta sesuai kedudukannya dalam periode pemerintahan parlementer.

2.1.2 Konsep Sistem Pemerintahan Parlementer

Pemerintahan ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara lembaga umum disusun & difungsikan dengan baik secara ekstern & intern terhadap warga negaranya. Menurut Inu Kencana dalam C.F. Strong, menjelaskan pemerintahan dalam arti luas sebagai aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, legislatif dan yuridis dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara. Dalam arti yang sempit, beliau mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan badan publik dan hanya terdiri dari badan eksekutif (Inu Kencana, 2006 : 5).

Sistem pemerintahan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem demokrasi parlementer, kabinet dan menteri-menteri

bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tetap kepala negara, tetapi bukan kepala pemerintahan, suara para anggota DPR biasanya keras sehingga pernah menimbulkan reaksi dikalangan angkatan bersenjata. Para anggota DPR hanyalah mencari kedudukan khususnya sebelum Pemilihan Umum 1955 (Tashadi, 1999:59).

pemerintahan parlementer menekankan pada demokrasi kedaulatan rakyat, kebebasan berbicara dan pers, serta tertib hukum, dan sebagainya walaupun masih terdapat perbedaan pendapat diantara pimpinan elite tentang arti demokrasi serta pelaksanaannya. Pemerintah dikuasai oleh elite sipil. Partai politik dipandang sebagai lembaga masyarakat yang terpenting bagi partisipasi rakyat dalam kehidupan nasional. Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (Albert Widjaja, 1982:87)

Di bawah parlementer perdana menteri merupakan orang pertama pemegang jabatan atau kekuasaan yang setara, meskipun beberapa perdana menteri lebih berkuasa dari perdana menteri lain. Menurut Arend Lijphart, Parlemenarisme adalah sebuah sistem politik eksekutif, setelah dipisahkan, ditentang oleh majelis yang kemudian diubah ke dalam sebuah parlemen yang terdiri dari pemerintah dan majelis Arend Lijphart (1995 : 36).

Mariam Budiardjo menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer, badan legislatif dan badan eksekutif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang “bertanggung jawab” diharapkan mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya dan mati hidupnya kabinet tergantung pada dukungan dalam badan legislatif (asas tanggung jawab menteri).

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem politik yang tugas pemerintahannya dipertanggung jawabkan oleh para menteri-menteri kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

2.1.3 Konsep Pemimpin

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Kartini Kartono, 2009 : 38-39). Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu atau tujuan-tujuan tertentu (Kartini Kartono, 2009 : 39).

Menurut Henry Pratt Fairchild dalam bukunya *Dictionary Of Sociologi and Related Sciences* menyatakan pemimpin ialah seorang yang memimpin dengan cara memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestie, kekuasaan atau posisi (Kartini Kartono, 2009 : 38).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka pemimpin adalah Seorang yang memiliki kelebihan dan kecakapan tertentu dalam mengatur dan mengarahkan seseorang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan.

Dalam hal ini, sebagai pemimpin Mohammad Hatta menjadi wakil presiden dan perdana menteri Mohammad Hatta membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan didalam pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.4 Konsep Mohammad Hatta

Mohammad Hatta sebagai wakil presiden konstitusional maupun wakil prsiden Indonesia pertama yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekaligus tetap sebagai *korps* kesatuan yang berwenang untuk membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan. Mohammad Hatta membuat kebijakan atau peraturan atas kerjasama nya dengan presiden Soekarno terutama kepada gerakan diplomasi seperti didalam Kabinet Hatta. Suatu kerjasama yang ideal yang kemudian menimbulkan mitos : selama dwi tunggal ada, Republik Indonesia selamat. Alasan tersebut dipergunakan oleh banyak pemimpin berbagai aliran, partai dan organisasi saat membentuk kembali Negara Kesatuan pada tahun 1950 (Mohammad Hatta, 1971: xxxi). Mohammad Hatta mengerti benar atas kedudukannya sebagai wakil presiden. Sebagai wakil presiden, Hatta tidak mempunyai tanggung jawab politik. Tanggung jawab pemerintahan sekarang berada di tangan kabinet. (Mohammad Hatta, 1971: xxxii).

Mohammad Hatta dapat menganjurkan berbagai ide atau tindakan kepada kabinet yang bertanggung jawab. Jika perlu Mohammad Hatta dapat membantu kabinet dalam melaksanakan cita-cita yang disetujuinya dan disetujui oleh parlemen, tetapi tidak dapat mengambil tindakan sendiri.

Terlepas dari itu, bukan berarti Mohammad Hatta tidak berperan aktif dalam memimpin Indonesia sebagai wakil presiden, karena melalui keadaan yang sulit yang sekaligus merangkap sebagai perdana menteri. Karenanya, kebijakan ataupun peraturan yang dibuat Mohammad Hatta lebih condong Mohammad Hatta buat selama saat menjadi atau menjabat sebagai ketua Kabinet.

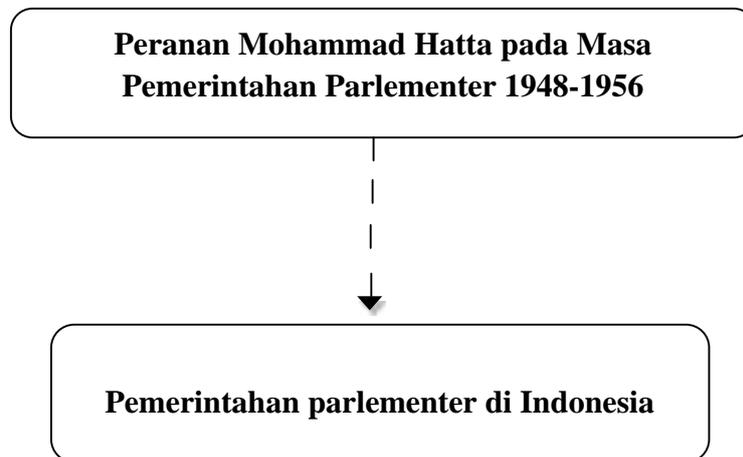
2.2 Kerangka Pikir

Sistem pemerintahan parlementer berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada saat itu pergantian kabinet dilatarbelakangi oleh perbedaan tajam antara partai pemerintah dan partai oposisi. Bahkan terjadi partai pemerintah menjatuhkan kabinetnya sendiri. Latar belakang pengetahuan Mohammad Hatta yang luas dan mendalam tentang perekonomian, serta pemahamannya tentang seluk beluk soal-soal ketatanegaraan yang cukup mumpuni itulah yang mempengaruhi dan mendukung peranan Mohammad Hatta di dalam pemerintahan terlebih lagi khusus nya pada pemerintahan parlementer.

Selain dikenal sebagai proklamator, juga pejuang pergerakan dan pemikir yang visioner, Mohammad Hatta dipandang banyak kalangan sebagai peletak konsep keadilan, keterbukaan, dan demokrasi. Pemikiran yang paling monumental adalah pentingnya membangun demokrasi ekonomi sosial, Mohammad Hatta wujudkan ke dalam bentuk yang ideal dalam gagasan ekonomi kerakyatan nya. Pemikiran Mohammad Hatta tercermin pula pada keinginannya memberikan otonomi luas pada daerah-daerah.

Mohammad Hatta berpendapat bahwa demokrasi sosial merupakan jembatan atas kemutlakan demokrasi politik disatu pihak dan demokrasi ekonomi di pihak lain. Pernyataan Mohammad Hatta sendiri dengan demokrasi politik yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan yang ia buat pada masa pemerintahan parlementer. Mohammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta menunjukkan peran besar dalam proses jalannya sistem pemerintahan parlementer.

2.3 Paradigma



Keterangan :

— — ► : Garis hubungan

REFERENSI

- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Grafindo: Jakarta. Halaman 212
- Cohen, Bruce. J. 1992. *Metode Penelitian Deskriptif*. Jakarta : Gramedia. Halaman 81
- W.J.S Poerwadarminta. 1995. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Halaman 751
- Ibid. Halaman 735
- Ibid. Halaman 1136
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1990. *Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka Halaman 997
- Budiardjo, Mariam. 2012. *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia. Halaman 219
- Kencana, Inu. 2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 5
- Lijpart, Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parleментар dan Presidensial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Halaman 36
- Kartono, Kartini. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 38
- Ibid. Halaman 38-39
- Kartono, Kartini. Op. Cit. Halaman 39
- Mohammad Hatta. 1979. *Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis*. Jakarta : Mutiara. Halaman 7

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang menyangkut masalah kerja yakni cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Sayuti Husin, 1998:32). Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian.

3.2 Metode yang digunakan

Metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat tertentu (Winarno Surakhmad, 1982 : 121). Pendapat lain mengatakan bahwa metode merupakan jalan yang berkaitan dengan kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan (Joko Subagyo, 2006 : 1).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan. Oleh karenanya, metode penelitian sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatumasalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis, karena penelitian ini mengambil objek dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Menurut Louis Gottschalk metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu (Louis Gottschalk, 1986 : 32).

Menurut Mohammad Nazir metode penelitian historis adalah suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari suatu statuskeadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang (Mohammad Nazir, 1988 : 56).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka penelitian historis adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau berupa data dan fakta atau dokumen yang disusun secara sistematis, dari evaluasi yang objektif dari data yang berhubungan dengan kejadian masa lampau untuk memahami kejadian atau keadaan baik masa lalu maupun masa sekarang.

Tujuan dari Penelitian Historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, memverifikasikan, mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Penelitian historis, validitas, dan reabilitas hasil yang dicapai sangat ditentukan pula oleh sumber datanya.

Data historis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer, yakni data autentik. Data yang langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan atau data asli.
2. Data sekunder, yakni data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan selanjutnya, atau data tidak asli (Budi Koestoro dan Basrowi, 2006 : 122)

Menurut Nugroho Notosusanto langkah-langkah dalam penelitian historis, yaitu:

1. Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah.
2. Kritik adalah menyelidiki apakah jejak sejarah itu asli atau palsu.
3. Interpretasi adalah setelah mendapatkan fakta-fakta yang diperlukan maka kita harus merangkaikan fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal.
4. Historiografi adalah suatu kegiatan penulisan dalam bentuk laporan hasil penelitian (Nugroho Notosusanto, 1984 : 11).

Berdasarkan langkah-langkah penelitian historis, maka langkah-langkah kegiatan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Heuristik

Peneliti mencoba mencari serta mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang diperlukan dan berhubungan dengan tema penelitian yang diajukan. Kegiatan heuristik juga difokuskan untuk mencari buku-buku literatur yang sudah ditulis oleh sejarawan, buku tersebut dijadikan gambaran bagi penulis serta acuan dalam penelitian. Proses pencarian sumber-sumber sejarah tersebut dengan mengunjungi berbagai

perpustakaan seperti Perpustakaan Universitas Lampung dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung. Adapun sumber-sumber yang ditemukan untuk membantu menjelaskan konsep dalam penelitian berjumlah 5 buku, terdiri dari Buku *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru* karya Soerjono Soekanto. Buku *Metode Penelitian Deskriptif* karya Bruce. J. Cohen. Buku *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karya W. J. S. Poerwadarminta. Buku *Pemimpin dan Kepemimpinan* karya Kartini Kartono. Buku *Sistem Pemerintahan Parleментар dan Presidensial* karya Arend Lijpart. Buku mengenai metode penelitian dalam penelitian ini berjumlah 11 buku, terdiri dari Buku *Pengantar Metodologi Riset* karya Husin Sayuti. Buku *Statistika Untuk penelitian* karya Sugiyono. Buku *Metode-Metode Penelitian masyarakat* karya Koenjaraningrat. Buku *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* karya Winarno Surakhmad. Buku *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek* karya Joko P. Subagyo. Buku *Mengerti Sejarah* karya Louis Gottschalk. Buku *Metodologi Penelitian* karya Mohammad Nasir. Buku *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)* karya Nugroho Notosusanto. Arikunto. Buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* karya Suharsimi Arikunto. Buku *Penelitian Terapan* karya Nawawi. Buku *Metodologi Penelitian Sosial* karya Usman, Husaini Setiady Akbar dan Purnomo.

Adapun sumber buku sejarah yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 15 buku, terdiri dari Buku *Kumpulan Pidato I dari Tahun 1942-1956* Karya Mohammad Hatta. Buku *Kumpulan Pidato II dari*

Tahun 1951-1979 karya I Wangsa Widjaja. Buku *Mengenang Bung Hatta* karya I Wangsa Widjaja. Buku *Indonesia Merdeka : Biografi Politik Mohammad Hatta* Karya Mavis Rose. Buku *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi* karya Albert Widjaja. Buku *Nasioanlisme dan Revolusi Indonesia* karya George Mc Turnan Kahin. Buku *Biografi Politik Mohammad Hatta* karya Deliar Noer. Buku *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia* karya Bibit Soeprapto. Buku *Pemikiran Ekonomi Kerakyata* karya Zon Fadli. Buku *Ekonomi Rakyat* karya Soeharto Prawirokusumo.

Buku *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* karya Mohammad Hatta. Buku *Bung Karno Menggali Pancasila* karya Wawan Tunggu Alam. Buku *Mohammad Hatta* karya Amrin Imran. Buku *Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis* karya Mohammad Hatta. Buku *Mendayung Antara Dua Karang* karya Mohammad Hatta. Buku *Mohammad Hatta: Biografi Politik* karya Deliar Noer. Buku *Mohammad Hatta Biografi Singkat* karya Salman Alfarizi

2. Kritik

Tahapan selanjutnya setelah sumber terkumpul, yaitu melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah didapat untuk menguji apakah sumber tersebut valid atau tidak, serta layak menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan. Kritik sejarah dibedakan menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan penilaian terhadap kealsian dan kebenaran isi suatu data yang sudah didapat, kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan

sumber sejarah yang berbeda-beda. Kritik ekstern merupakan proses penilaian keabsahannya terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kisah sejarah. Dalam tahap ini dilakukan suatu pengujian terhadap literatur, kemudian diteliti dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau sebaliknya, serta dapat digunakan dalam penulisan ini.

Oleh karena itu, sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah literatur yang berkaitan dengan Peranan Mohammad Hatta Pada Masa Pemerintahan Parlementer 1948-1956. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mencari tahu dan membuktikan keabsahan dari sumber-sumber yang peneliti dapat, setelah itu peneliti membandingkan dan memilih dari beberapa buku dan sumber yang peneliti yakini bahwa berita dan sumbernya dapat dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.

3. Interpretasi

Tahapan selanjutnya setelah penulis melakukan langkah ke dua, yaitu kritik [terhadap sumber data. Kemudian terkumpul fakta-fakta sejarah, maka langkah berikutnya adalah langkah interpretasi atau penafsiran fakta-fakta sejarah. Menginterpretasikan fakta sejarah dalam rangkaian suatu kesatuan yang harmonis dapat dipercaya dan masuk akal.

4. Historiografi

Tahap terakhir dalam metode penulisan sejarah adalah Historiografi. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia harus

mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis menggunakan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi menggunakan pemikiran kritis dan analisisnya karena pada akhirnya ia harus melakukan penyusunan atau penulisan dalam bentuk laporan hingga menjadi sebuah kisah sejarah yang sistematis.

Dalam langkah Historiografi ini, penulis mencoba untuk mengerahkan seluruh daya pemikiran untuk membuat dan menyusunnya menjadi kisah sejarah berdasarkan dengan sumber-sumber yang ada. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka metode historis adalah suatu cara dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data-data historis, serta di interpretasikan secara kritis untuk dijadikan bahan dalam penulisan sejarah untuk menarik kesimpulan secara tepat.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel dalam pengertian umum adalah suatu konsep yang diberi nilai. Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 201 : 60).

Dalam suatu penelitian variable merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja karena dengan variable kita lebih dapat memfokuskan apa yang menjadi objek penelitian kita sehingga akan lebih mempermudah cara kerja (Mohammad Nazir, 1998 : 149).

Dari pendapat para ahli diatas, maka variabel penelitian yaitu sebuah objek yang mempunyai nilai dan menjadi pusat perhatian dari penelitian. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel tunggal yaitu Peranan Mohammad Hatta pada masa pemerintahan Parlementer 1948-1956.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Suatu teknik pengumpulan data dan alat yang digunakan akan menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan data harus cara yang cermat dan memenuhi syarat-syarat pengumpulan data yang reabilitas dan validitas, dengan demikian relevansi data yang didapatkan akan menentukan tujuan penelitian, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

Untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan masalah yang akan dibahas maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

3.5.1. Teknik Kepustakaan

Menurut Koenjaraningrat, teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan, misalnya dalam bentuk koran, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koenjaraningrat, 1983: 133). Menurut Joko Subagyo teknik kepustakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam penelitian ilmiah (Joko Subagyo, 2006:109).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik kepastakaan antara lain:

- a. Menyiapkan alat perlengkapan berupa pulpen dan kertas.
- b. Menyusun bibliografi kerja, yaitu catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk keputusan penelitian. Mencari daftar katalog tentang alat bantu bibliografi seperti: buku bibliografi, ensiklopedia, kamus khusus, indeks jurnal (majalah dan koran), dan katalog, daftar koleksi utama, dan sumber lainnya.
- c. Mengatur waktu. Membaca dan membuat catatan penelitian. (Mestika Zed, 2004:17-22).

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka teknik kepastakaan adalah sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi serta data melalui buku-buku yang terdapat di Perpustakaan Universitas Lampung dan Perpustakaan Dearah Provinsi Lampung untuk mendapat teori-teori atau argumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik kepastakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan Peranan Mohammad Hatta Pada Masa Pemerintahan Parlementer 1948-1956M.isalnya buku dan catatan seperti yang telah dijabarkan dalam metode penelitian sejarah tahap heuristik, setelah didapatkan sumber-sumber tertulis tersebut, selanjutnya yang dilakukan adalah memahami isi buku dengan membaca dan membuat catatan-catatan dari beberapa buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5.2.Teknik Dokumentasi

Tehnik dokumentasi yaitu, suatu metode atau cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 158).

Menurut Nawawi (1993: 134), Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga bukubuku, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan buku-buku, surat kabar, artikel, dan arsip bersejarah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam poses penelitian yang sangat penting, karena data yang diperoleh akan lebih memiliki arti bila telah dianalisis dan dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan demikian tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau memuatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya (Joko Subagyo, 2006: 106).

Pada dasarnya proses pengumpulan data dan analisis data dapat dilakukan secara bersamaan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang diperlukan dalam menganalisis data-data tersebut.

Proses analisis data kualitatif terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Reduksi Data, ialah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Penyajian Data, adalah menyajikan data dalam bentuk matrik, *network chart*, atau grafik dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam menganalisis atau mengambil tindakan nantinya akan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.
3. Verifikasi Data adalah usaha untuk mencari pola, model, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya untuk diambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi Data dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan 28 cara mengumpulkan data baru (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003 : 87).

Langkah operasional dalam teknik analisis data adalah dengan menulis kembali dengan bahan informasi yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah berdasarkan catatan yang ada dan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini pertama Reduksi data, yaitu memilih pokok-pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, contoh mengenai Peranan Mohammad Hatta. Selanjutnya penyajian data, penyajian data ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menentukan mana yang lebih mendekati kebenaran tentang peran yang dilakukan Mohammada Hatta Pada masa pemerintahan Parlemerter tahun 1948-1956. Selanjutnya Verifikasi Data yaitu mencari hubungan antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya.

REFERENSI

- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta. Fajar Agung. Halaman 32
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta. Yayasan obor Indonesia. Halaman 17
- Ibid. Halaman 22
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk penelitian*. Bandung : Alfabeta. Halaman 60
- Nazir Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Halaman 149
- Louis Gottschalk. 1986. *Mengerti Sejarah*. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Halaman 32.
- Basrowi dan Suwardi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Halaman 158.
- Koenjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia. Halaman 133
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta. Halaman 106
- Joko P. Subagyo, *Op. Cit.*, Halaman 106.
- Muhammad Ali. 1985. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung : Alfabeta. Halaman 43.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta Halaman 158
- Nawawi. 1993. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta. Halaman 134
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. Halaman 87

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peranan Mohammad Hatta pada masa pemerintahan parlementer 1948-1956 yaitu dapat dilihat dari beberapa peranannya dibawah ini :

1. Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri

Sejak diangkat menjadi perdana menteri Mohammad Hatta dikenal sebagai pemimpin yang lebih menyukai dalam kebijakan diplomasi, dalam kesempatan itu Mohammad Hatta mewujudkan melalui kebijakannya pada kabinet Hatta I mendirikan PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) di Sumatra dengan memanggil Sjariffudin Prawinegara dengan anjuran membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Berunding menyelesaikan perjanjian Renville, membuat program Rasionalisasi, mendirikan NIS, melancarkan pembangunan. Pada program Kabinet Hatta II Mohammad Hatta membuat program kebijakan untuk menghadapi perjanjian KMB dengan pembentukan KAI (Konferensi Antar Indonesia), menjadi ketua Delegasi Indonesia. Pada Kabinet Hatta

III, Mohammad Hatta membuat kebijakan luar negeri bebas aktif dan berhasil menentukan posisi Indonesia.

2. Mohammad Hatta sebagai Ketua Delegasi KMB

Saat Mohammad Hatta menjabat Ketua Delegasi Konferensi Meja Bundar Mohammad Hatta berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari negara-negara lain dengan menandatangani berkas dokumen resmi penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda yang diwakili oleh ratu Yuliana.

3. Mohammad Hatta Pengagas Ekonomi Kerakyatan

Gagasan Ekonomi Kerakyatan yang dicanangkan Mohammad Hatta adalah mengenai Politik Perekonomian dalam demokrasi sosial. Mohammad Hatta menganggap ekonomi adalah sebuah ilmu yang memberikan penjelasan mengenai jalan umum yang ditempuh manusia dalam usaha mencapai kemakmuran yang diimplementasikan nya kedalam bentuk Koperasi.

4. Mohammad Hatta Wakil Presiden Konstitusional, Kedudukan dan peran Wakil Presiden pada UUDS 1950, tidak memiliki peran yang cukup berarti dalam menentukan penyelenggaraan kenegaraan, karena undang-undang dasar ini menganut sistem pemerintahan parlementer yang mengakibatkan Mohammad Hatta yang menjabat menjadi wakil presiden hanya berfungsi sebagai lambang negara. Mohammad Hatta lebih banyak memberi masukan pada presiden, menteri, gubernur, tokoh masyarakat, pemuda, pengusaha dan sebagainya dalam mereka mengambil kebijakan.

Mohammad Hatta meletakkan jabatan sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956.

5. Pelaksanaan Pemerintahan Parleментар di Indonesia, pada masa pemerintahan parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan Tidak stabil, sehingga program pembangunan dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkeselimbangan. Salah satu penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer, kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR, dan pemerintahan lain adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Mohammad Hatta adalah pendukung negara serikat dan cita-citanya membangun pemerintahan parlementer bagi Indonesia. Pemerintahan parlementer bisa berjalan baik jika ditunjang oleh tingkat pendidikan rakyat yang tinggi, sedangkan negara serikat tidak begitu mengkrystal dalam gagasannya. Karena itu baginya, pemberlakuan prinsip otonomi dalam negara kesatuan sudah mendekati citacitanya. Sumber-sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial menurut analisa Mohammad Hatta ada tiga pokok yaitu paham sosialisme Barat yang menjunjung tinggi perikemanusiaan, ajaran Islam dan kolektivisme masyarakat Indonesia.

5.2 SARAN

Sebagaimana kita selaku warga negara Indonesia yang sudah dijajah selama berpuluh-puluh tahun sudah sewajibnya kita melihat serta mengambil manfaat positif dari sejarah, maka penulis menyampaikan saran diantaranya :

1. Untuk para pembaca, sudah sepatutnya menjadikan karakter Mohammad Hatta sebagai pelecut motivasi dalam berakademisi.
2. Untuk generasi muda, untuk lebih dapat memaknai peran besar arti Seorang Mohammad Hatta dan kritis terhadap berbagai macam persoalan sosial idialisme dan hukum.
3. Untuk program studi Sejarah Universitas Lampung skripsi ini bisa djadikan kemudahan dalam mencari sumber informasi mengenai Peranan Mohammad Hatta khususnya pada Parlementer.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Salman. 2009. *Mohammad Hatta Biografi Singkat*. Jogjakarta : Garasi.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- _____.1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta Arikunto.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bibit Soeprapto. 1985. *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan Indonesia*. Halaman 100-101.
- Bung Hatta. 2003. *Kumpulan karangan Mohammad Hatta*. Jakarta: KOMPAS
- Cohen, Bruce. J. 1992. *Metode Penelitian Deskriptif*. Jakarta : Gramedia.
- Daliman. A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Deliar Noer. 1990. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES
- _____. 2002. *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa*. Jakarta : Djambatan.
- Djoenir Moehammad. 1997. *Memoar Seorang Sosialis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Duverger, Maurice. 1981. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Fauzie Ridjal. 1991. *Dinamika Budaya dan Politik Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

- Gosttschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- I Wangsa Widjaja 1981. *Mohammad Hatta Kumpulan Pidato I dari Tahun 1942-1956*. Jakart: Yayasan Idayu.
- _____. *Mohammad Hatta Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951-1979*). Jakarta: Yayasan Idayu.
- J. D Legge. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta. : Gravitie.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kencana, Inu. 2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Koenjaraningrat . 1983. *Metode-Metode Penelitian masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- _____. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Lijphart, Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mavis Rose. 1991. *Indonesia Merdeka : Biografi Politik Mohammad Hatta*. Jakarta : Gramedia.
- Mohammad Hatta. 1976. *Mohammad Hatta, Mendayung antara dua karang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 2014. *Mohammad Hatta Demokrasi Kita, Pikiran-pikiran tentang Demokrasi dan kedaulatan Rakyat*. Bandung : Segi Arsy.
- _____. 1987. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta : PT Inti Idayu Press
- Nawawi. 1993. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Husin. Sayuti.1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta Fajar Agung

Prawirokusumo. Soeharto.2001. *Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Grafindo: Jakarta.

_____. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Grafindo: Jakarta.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta

Subakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo

Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk penelitian*. Bandung : Alfabeta

Sukarna. 1981. *Sistem Politik*. Bandung : Alumni

Tashadi.1999. *Tokoh-tokoh Pemikir Kebangsaan / Ir. Soekarno dan K.H Ahmad Dahlan*. Jakarta : CV. Ilham Bangun Karya

Usman , Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wawan Tunggu Alam. 2003. *Bung Karno Menggali Pancasila*. Jakarta : Gramedia

Widjaja. Albert. 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES

W.J.S Poerwadarminta. 1995. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta. Yayasan obor Indonesia.

Zon Fadli. 2008. *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Fadli Zon library

Jurnal

Maryono. 2015. *Bung Hatta, Proklamator, Ilmuwan, penulis dan Karya-karyanya : Sebuah Analisis Bio-Bibliometrik*.

<http://downloadportalgaruda.org/article.php.%farticle%3D408912%26val%3D7131%26title%3DBUNG%2520HATTA%2520PROKLAMATOR%2520ILMUWAN%2520PENULIS%2520DAN%2520KARMA-KARYANYA%2520SEBUAH%2520ANALISIS%2520-BIBLIOMETRIK&SA=U&VE2AhUKEwiRtbj-mlHYAXjr48khXHIAaQF.pdf>

(diakses pada tanggal 12 September 2017 pukul 13.42)

Majalah

Tempo 20 Agustus 2001, *Hattanomics*. Jakarta Hlm 59 dan 64